

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam kajian hubungan internasional, perkembangan dan perubahan baik yang terjadi di dunia internasional, eksternal maupun internal suatu negara merupakan faktor-faktor signifikan yang perlu diperhatikan oleh para aktor politik internasional.

Penulisan ini bermula dari ketertarikan penulis untuk mengaplikasikan fenomena nuklirisasi di kawasan Timur tengah dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan perspektif ilmu hubungan internasional dalam upaya mendeskripsikan perkembangan nuklir di Iran serta upaya-upaya dunia internasional untuk memusnahkan nuklir dari negeri kaum mullah itu.

Salah satu isu internasional yang menonjol dalam dunia internasional saat ini adalah ketegangan baru antara Iran dan Amerika Serikat juga Uni Eropa oleh karena ketidakmauan atau keengganan Iran mengikuti keinginan pemerintah Bush tentang penghapusan program nuklirnya. Isu panas inilah yang dikhawatirkan dunia internasional mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Timur tengah bahkan di dunia.

Dalam perkembangan ilmu hubungan internasional, perkembangan dan bahkan perubahan baik yang terjadi di lingkungan internasional baik eksternal maupun internal suatu negara merupakan faktor-faktor signifikan yang perlu

diperhatikan oleh para pengambil keputusan atau aktor politik internasional dalam hal ini negara. Secara teoritis terdapat korelasi atau hubungan antara perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal dengan politik luar negeri suatu negara. Lebih lanjut, korelasi tersebut akan menghasilkan keputusan atau tindakan dan perilaku luar negeri yang sifatnya adaptasi terhadap lingkungannya. Begitu juga yang terjadi sekarang ini, Iran mempertahankan program nuklirnya merupakan adaptasi dari lingkungannya sebagai pertahanan dari pengaruh dan ancaman Amerika dan sekutunya yang berada di Irak dan Afghanistan.

Tekanan Amerika dan Uni Eropa terhadap Iran karena program nuklir dan sanksi Dewan keamanan PBB yakni Resolusi 1737 dan Resolusi 1747. Bahkan ancaman Amerika Serikat untuk menyerang Iran juga kembali dirilis Bush dalam pidato kenegaraan (*state of the union*) di depan anggota kongres, Rabu 2 Februari 2005. Namun, hal ini tidak membuat surut keinginan Iran untuk tetap melanjutkan program nuklirnya.

B. Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini. Pertama, untuk mengetahui sebab-sebab Iran tetap mengembangkan program nuklirnya walaupun dalam tekanan banyak pihak dan sudah dijatuhkan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB. Kedua, untuk mengetahui sebab-sebab hubungan Iran dengan negara-negara Barat.

C. Latar Belakang Masalah

Studi hubungan internasional menunjukkan fenomena yang luas, meliputi interaksi antar anggota komunitas internasional atau perilaku aktor dalam sistem internasional. Perilaku tersebut bisa berwujud kerjasama, konflik, perang, pembentukan aliansi, dan interaksi dalam organisasi internasional.¹

Timur tengah mempunyai arti strategis yang sangat besar bagi dunia. Pertama, letaknya pada titik pertemuan tiga benua (Afrika, Asia, dan Eropa), Timur tengah menguasai lalu lintas darat, laut, dan udara antara Eropa, Asia, dan Afrika. Kedua, di kawasan itu terdapat beberapa jalur pelayaran penting yaitu Selat Bosphorus, Selat Dardanella, Terusan Suez, Selat Bab El Mandeb, dan Selat Hormuz. Ketiga, kawasan ini mengandung sumber utama minyak, bahan bakar utama, dan bahan mentah yang paling diperlukan dalam peradaban industri kontemporer. Cadangan minyaknya hampir dua pertiga cadangan minyak dunia dan produksinya pernah mencapai 40% produksi dunia.

Oleh karena itu kawasan ini menjadi incaran negara-negara di dunia sehingga memiliki potensi konfliknya sangat tinggi, terutama antara negara-negara Arab melawan Israel bahkan antara negara-negara Arab sendiri.

Keberadaan kekuatan asing yakni Amerika Serikat yang menguasai Irak dan Afghanistan, Amerika Serikat yang notabennya negara penghasil senjata modern terbesar dengan kecanggihan teknologi militer yang handal dan memiliki daya ledak tinggi (*high explosive*) seperti senjata rudal, dan senjata nuklir dalam menopang

¹ Mulya, M. dkk. *Hubungan Internasional: Teori dan Analisis*. HCM, 1994 hal. 28

kekuatan tempur pemerintah Afghanistan melawan Thaliban dan dalam mewujudkan keamanan di Irak pasca invasi Amerika, letak kedua negara ini yang mengapit Iran sehingga posisi ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi Iran. Oleh karena itu negara kaum mullah, harus tetap waspada dan memiliki "*bargaining power*" seperti nuklir, agar bisa menangkal segala kekuatan asing yang akan mengancam kedaulatan negaranya.

Kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara memang menjadikan perubahan konteks politik internasional menjadi rawan konflik mengingat senjata tersebut memiliki nilai tawar kekuatan untuk menentukan suatu pemerintahan mempengaruhi yang lainnya, dengan kata lain nuklir merupakan instrumen kekuatan negara yang optimal saat ini. Namun keberadaan nuklir dapat memunculkan permasalahan dan ketegangan baru diberbagai belahan dunia termasuk yang terjadi dikawasan Timur tengah yang sangat rawan konflik.

Ketertarikan Iran pada upaya untuk memiliki dan mengembangkan nuklir sudah berlangsung sejak 1957. Pada masa itu, hubungan AS dan Iran yang berada dibawah pemerintahan Shah Reza Pahlevi sangatlah harmonis ditandai dengan perjanjian kerjasama nuklir sipil sebagai bagian dari program "*Atom for Peace*" AS. Melalui perjanjian ini, AS akan menyediakan bantuan teknis, menyediakan bantuan pengayaan uranium, dan kerjasama penelitian penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Pada tahun 1968, Iran menandatangani perjanjian NPT dan sejak itu pulalah Iran mengklaim memiliki hak mutlak (*unaliable right*) menggunakan dan mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai

Pecahnya perang Iran-Irak dari tahun 1980 hingga 1988 dan uji coba nuklir yang dilakukan Pakistan dan India pada Mei 1998 telah mendorong Iran untuk mempertimbangkan kepemilikan senjata nuklir sebagai modal dasar untuk pertahanan nasionalnya. Persoalan di Timur tengah yang semakin rumit, terutama eksistensi kapabilitas nuklir Israel juga semakin mendorong Iran untuk memiliki senjata nuklir.² Berdasarkan kutipan dari perkiraan IISS (International Institute for Strategic Studies) Dubes AS untuk IAEA memperkirakan kini Iran memiliki 85 metrik ton uranium yang dapat diolah menjadi senjata nuklir dalam waktu kurang dari satu tahun.³

Motivasi dan ambisi pemerintah Iran memiliki program nuklir didorong dua aspek penting. Pertama, kepemilikan program nuklir dapat digunakan sebagai faktor deterrent dan penyeimbang realitas hubungan internasional kontemporer.

Kepemilikan teknologi nuklir bukan semata-mata hanya ditujukan untuk kebutuhan (energi) domestik semata tetapi lebih jauh dari itu, kepemilikan nuklir bagi Iran merupakan alat penting politik luar negeri dalam interaksinya di sistem internasional. Selain itu, faktor deterrent ini juga menjadi alat utama kebijakan pertahanannya yang tertuang sebagai doktrin pertahanan dalam melindungi kepentingan nasionalnya.

Sementara itu, aspek kedua yakni peningkatan prestise internasional, mobilitas sosial dan *bargaining power* lebih ditujukan pada tingkat regional dimana

² Geoffrey, Kemp. *Iran's Nuclear Options; Iran Nuclear Weapon Options : Issues and Analysis*. The Nixon Center. Washington. 2001. hal 1-16.

³ Gregory J. Schultz. "Iran's nuclear programme: A Transatlantic Assessment" *Remarks at the*

Iran dikelilingi oleh negara-negara yang juga memiliki teknologi (per seperti India dan Israel. Gambaran interaksi keamanan regional di Ti dapat merugikan kepentingan keamanan nasional Iran. Sehingga Ira pilihan lain selain berupaya untuk memiliki program nuklir, terutam antar negara di Timur tengah sangat diwarnai oleh "*Struggle of pov* menekankan aspek politik-militer.

Dalam konteks motivasi dan ambisi politik-militer kebijakan Iran memfokuskan penguasaan kemampuan teknologi (persenja kedalam dua program utama. Pertama, program misil jelajah (*cruise* dengan jarak jangkauan yang bisa mencapai 2000-6000 km dimana menggunakan teknologi yang berasal dari RRC, seperti *silkworm* . Pengembangan misil jelajah ini dilaporkan bisa mencapai London. misil jarak pendek dengan jarak jangkauan 130-200 Km y pengembangan rudal Scud dari Rusia dan rudal No-Dong dari Korea

Motivasi dan kebijakan luar negeri Iran diatas untuk mengembangkan kemampuan teknologi (persenjataan) nuklir i memberikan konsekwensi penting terhadap stabilitas dan kawasan T dunia internasional, khususnya negara-negara Barat tentang seb canggih program misil yang dimiliki Iran dan reaksi kemudian ya komunitas internasional.

Kini seiring dengan berjalannya waktu, salah satu sanksi embargo yang diberikan DK PBB adalah embargo nuklir total. Embargo nuklir DK PBB kali ini bukanlah hal baru bagi Iran. Sekitar tahun 1980-an Iran pertama kali mendapatkan embargo nuklir dari Barat yang dimotori AS. Saat itu AS khawatir bahwa Iran akan menyalahgunakan teknologi nuklirnya untuk program senjata nuklir. Bahkan, Jerman yang sedang membangun fasilitas reaktor *light water* (air ringan) kembar berkekuatan 1300 Mega Watt (MW), secara sepihak menghentikan aktivitasnya untuk mendukung seruan embargo AS. Fakta menunjukkan bahwa embargo nuklir AS tersebut justru telah memaksa Iran untuk menjalin kerja sama di bidang nuklir dengan Cina dan Rusia.

Sejak tahun 1990-an Cina dan Rusia telah banyak membantu Iran dalam pembangunan teknologi yang sensitif termasuk *light water*, *heavy water*, produksi *nuclear-grade graphite*, rancangan reaktor riset, teknologi pengayaan laser, mentransfer teknologi nuklir dan teknologi informasi, memberikan pelatihan kepada ilmuwan Iran serta membantu Iran dalam penyediaan bahan reaktor nuklir. Walaupun secara formal sudah ada pernyataan penarikan dukungan bantuan teknik dari Cina dan Rusia, para pengamat memperkirakan bahwa diplomasi rahasia (*secret diplomacy*) dukungan pebisnis militer Rusia dan Cina dalam pengembangan reaktor nuklir Iran masih tetap berlangsung.

Satu hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa hampir tiga puluh tahun sejak tampilnya Ayatullah Khomeini ke tampuk kekuasaan, Iran sudah terlatih dan

1. ... sebagai instrumen untuk mencapai

kepentingan-kepentingan nasionalnya. Itu berarti jaringan kerja global (*networks*) Iran sudah membumi, mengakar, dan teruji. Tidak menutup bahwa salah satu bagian dari networking tersebut adalah berbagai kelompok perjuangan di dunia yang anti-imperialisme Amerika Serikat.

Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menyatakan bahwa mencapai target untuk mengaktifkan lebih dari 3.000 alat pengayaan. Dengan demikian, Iran berhasil menghadapi tantangan-tantangan dari superpower yang menentang program nuklir Iran. Setiap minggu menginstal satu unit baru alat pengayaan uraniumnya.

Iran akan menjadi negara yang memiliki nuklir tanpa harus mempedulikan negara manapun. Kekuatan-kekuatan hegemoni mengira bahwa mundur jika mereka memberikan sanksi terhadap negara ini, tetapi mengalami kemajuan dalam program nuklirnya setiap kali diberi sanksi.

Reaksi keras AS dan beberapa negara Uni Eropa, terhadap negara di luar *'the nuclear club'* yang memiliki teknologi (senjata) nuklir yang berstandar ganda oleh komunitas internasional. Di satu sisi, negara-negara di atas sangatlah keras menentang upaya kepemilikan teknologi (senjata) nuklir yang dimiliki Korea Utara dan Iran. Sementara itu, mereka tidak mengadopsi kebijakan yang sama terhadap Israel, India, dan Pakistan.⁵ Tentu saja

⁵ Claudia Baumgart, Harald Muller, "A Nuclear Free Zone In The Middle East: A Pie

yang didiambil oleh negara-negara Barat sangat terkait dengan kondisi politik global dan kepentingan nasional negara-negara Barat tersebut.

Namun, bagi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia dan Amerika Latin mendukung program nuklir untuk tujuan damai, hal ini terlihat ketika presiden Ahmaddinejad melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan saat itu Indonesia mendukung program nuklir Iran. Tetapi kemudian dalam sidang DK PBB Indonesia mendukung sanksi terhadap Iran. Selain itu, Presiden Venezuela, Hugo Chavez, juga menyerukan kepada negara-negara di seluruh dunia agar menghentikan rencana AS untuk menyerbu Iran. Chavez, menyatakan ini ketika sehari setelah Dewan Keamanan (DK) PBB melakukan pemungutan suara guna memperkeras sanksi atas Iran sehubungan dengan penolakannya untuk mengungkapkan program nuklirnya, mengutip laporan pers Rusia yang dilaporkan akan merinci waktu dan tempat serangan terhadap Iran oleh Amerika Serikat.

Oleh karena sikap Iran yang tetap ingin mempunyai teknologi nuklir, maka AS dan sekutunya membujuk PBB untuk memberikan sanksi terhadap Iran. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya secara bulat menyetujui pemberian sanksi berat terhadap Iran. Semua negara anggota tetap dan tidak tetap DK PBB menyetujui resolusi baru 1747 bagi Negeri Mullah itu karena enggan menghentikan program nuklirnya.

Secara garis besar, Resolusi 1747 berisi pemblokiran seluruh ekspor senjata dari dan ke Iran, membekukan aset 28 pejabat dan institusi tambahan yang terkait

terkait Garda Revolusi. Resolusi juga melarang semua negara dan lembaga keuangan internasional membuat komitmen baru dalam rangka hibah, bantuan, dan pinjaman keuangan kepada Iran. Beberapa pejabat Iran dan anggota Garda Revolusi, di antaranya Wakil Komandan Garda Revolusi Brigadir Jenderal Morteza, Kepala Staf Gabungan dan Wakil Administrator Ali Akbar Ahmadian, dan Komandan Angkatan Darat Brigadir Jenderal Mohammad Reza Zahedi, dicekal ke luar negeri.

Pemerintah Iran tidak gentar atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya yakni resolusi DK PBB 1747. Resolusi DK PBB 1747 ini merupakan perluasan Resolusi 1737 yang dikeluarkan 23 Desember 2006, berisi agar dalam 60 hari Iran menghentikan program nuklirnya. Resolusi 1737 itu tidak dihiraukan Pemerintah Iran sehingga DK PBB merasa perlu membuat tekanan lebih kuat.⁶

Namun jauh sebelum sanksi itu, banyak upaya-upaya untuk menjatuhkan pemerintahan Iran yang sudah dirancang jauh sebelum invasi ke Irak. Tidak lama setelah serangan 9/11, wakil Menhan AS urusan kebijakan waktu itu, Douglas Feith langsung menyusun rencana Pentagon untuk melancarkan invasi sekaligus ke Irak, Iran dan Suriah, atas nama "*global war on terrorism*".

Pada tahun 2004 AS membentuk sebuah "*Coalition for Democracy In Iran*" dan menganggarkan sekitar US\$ 3 milyar guna melancarkan operasi di Iran. Kaum *neocons* ini dikenal luas menjalin persekutuan dengan kaum sayap kanan di Israel. Rencana serangan AS ke Iran juga menjadi kepentingan Israel. Negara ini sudah lama menganggap Iran sebagai ancaman yang "paling serius." Iran yang dianggap sebagai

bagian dari *"the axis of evil"* kini memang praktis sudah terkepung oleh kekuatan militer AS. Di sebelah timur dan barat, ribuan pasukan AS sudah berada di Afghanistan dan Irak. Di selatan, pangkalan militer AS sudah lama dibangun di negara-negara Arab Teluk (khususnya Kuwait dan Arab Saudi). Di utara ada pangkalan NATO di Turki. Dan Pakistan yang juga berdekatan dengan Iran sudah sejak lama menjadi sekutu utama AS.

Maka, setiap saat AS bisa melancarkan aksi militer ke Iran dari segala penjuru, sekalipun tanpa dukungan dari negara-negara Eropa. Apalagi Israel juga memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan langsung ke reaktor nuklir Busheh di Iran, seperti yang pernah mereka lakukan terhadap reaktor nuklir Osirak di Irak pada tahun 1981.

Amerika Serikat juga berencana untuk mengebom fasilitas nuklir dan militer Iran telah terungkap meski pihak Amerika Serikat segera membantah. Dalam rencananya target pengeboman tidak hanya fasilitas pembangkit energi bertenaga nuklir yang selama ini diributkan Amerika, tetapi juga pangkalan angkatan udara, angkatan laut, fasilitas-fasilitas peluncuran rudal dan pusat komando pertahanan.

Bocornya rencana ini terungkap di tengah ketegangan Iran vs Amerika yang belakangan semakin meningkat. Amerika menuduh Iran telah mengembangkan fasilitas pembuatan senjata nuklir dengan kamuflase pengembangan pembangkit listrik bertenaga nuklir. Iran berkali-kali membantah tuduhan itu. Menurut seorang pejabat tinggi militer Amerika hampir melakukan pengeboman itu setelah mempe-

tekanan melalui jalur diplomasi yang selama ini digunakan gagal. Daftar yang akan dibom termasuk fasilitas nuklir di Natanz, Isfahan, Arak, dan Bushehr.

Amerika dan Iran tidak pernah mengalah dalam masalah nuklir Iran. Menekan program nuklir Iran adalah tujuan yang ditetapkan Amerika, sedangkan memiliki teknologi nuklir merupakan tekad Iran yang tak dapat digoyahkan, sehingga hubungan AS-Iran semakin tegang.

Pada awal tahun 2007, Presiden Amerika George W. Bush mengumumkan politik baru Amerika terhadap Irak dan menempatkan dua formasi kapal induk di kawasan Teluk. Tindakan Amerika itu mengundang syak wasangka masyarakat internasional, mereka berpendapat Amerika sangat mungkin melancarkan serangan militer terhadap Iran. Di bawah latar belakang ini, dalam waktu satu bulan Iran berturut-turut dua kali mengadakan latihan militer. Menteri Pertahanan Iran, Mustafa Mohammad Najjar menyatakan dengan tegas, menghadapi serangan yang mungkin dilancarkan Amerika terhadap sarana nuklir Iran, Iran sudah melakukan persiapan untuk mengantisipasi ancaman militer apapun.

Selain itu, latihan militer yang diadakan selama kegiatan perayaan genap 29 tahun kemenangan Revolusi Islam Iran, juga terdapat pertimbangan terhadap situasi internya. Menurut laporan, menghadapi tekanan besar-besaran dari masyarakat internasional dalam masalah nuklir Iran, telah muncul pandangan negatif di dalam negeri Iran. Pandangan itu berpendapat, Iran harus mengubah sikapnya dalam masalah nuklirnya, untuk meredakan hubungan tegang dengan negara-negara Barat

lhubungannya dengan Amerika. Dalam kondisi ini, pemerintah Mahmud Ahmadinejad

mencoba melalui latihan militer untuk mengobarkan semangat juang tentara dan rakyat, dan menghapuskan sejumlah kekhawatiran dan kecemasan dalam negeri, serta meningkatkan kewibawaan pemerintah.

D. Pokok Permasalahan

Dari Latar Belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan yang timbul adalah mengapa Iran tetap melanjutkan program nuklirnya pasca Resolusi DK PBB 1747?

E. Kerangka pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*) sebagai acuan dasar pemikiran. Teori Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*) tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai alat eksplanasi dalam mengupas permasalahan.

Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*)

Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, suatu negara mempunyai politik luar negeri yang meliputi semua kebijakan yang diambil oleh suatu negara dengan negara lain.

Dalam pengertian luas politik luar negeri adalah pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya, dalam hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang meliputi serangkaian tindakan khusus. Analisa

kebijakan luar negeri adalah usaha untuk mendapatkan penjelasan yang rasional mengapa suatu negara berperilaku demikian. Suatu titik permulaan adalah pemikiran tentang proses untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri.⁷ Kebijakan luar negeri merupakan respon atas sejumlah stimulan baik eksternal maupun internal, yang ditujukan bagi tujuan-tujuan yang berbeda aksinya dalam mewujudkan berbagai bentuk dan menghasilkan banyak-banyak tujuan.⁸

Politik luar negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus dicapai diluar batas wilayahnya, dan hal itu diterapkan dalam sejumlah keputusan yang dibuat dalam kebijakan politik suatu negara. Para aktor pengambil keputusan luar negeri suatu bangsa akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap formulasi kebijakan politik luar negerinya.

Menurut William D. Coplin, Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Atau *Foreign Policy*, yaitu:

“ apabila kita akan menganalisa kebijakan politik luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar kalau kita menganggap bahwa para pengambil keputusan politik luar negeri bertindak sembarangan. Sebaliknya politik luar negeri tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari ketiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri.

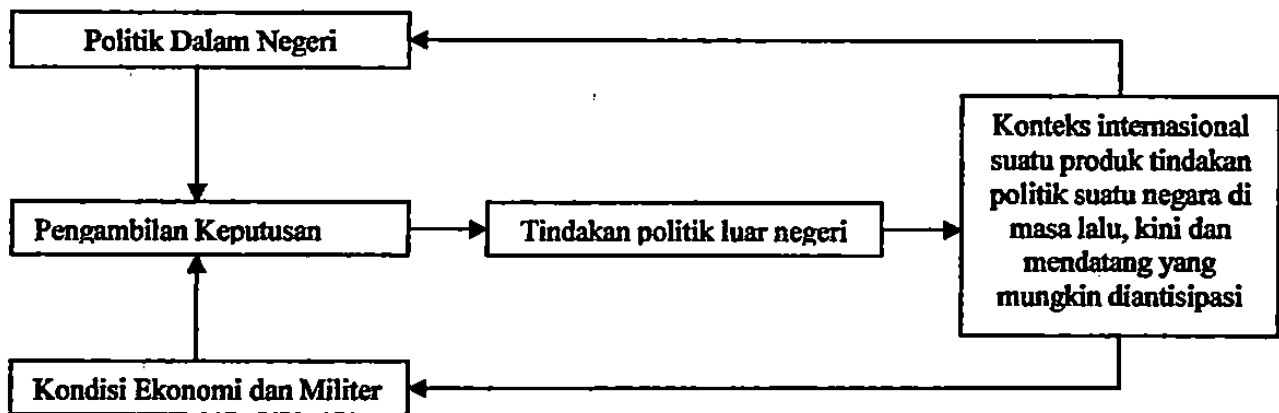
- a. Kondisi politik dalam negeri, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya.
- b. Kemampuan ekonomi dan militer, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.

⁷ James N. Rosenau, *Comparing Foreign Policy*, Sage publication, Beverly Hills, 1974.

⁸ James N. Rosenau, *World politics: An Introduction*, The Press, New York, 1976.

- c. Konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu. Serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.⁹

**Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri
(menurut William D. Coplin)**



Sumber: Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri yang diungkapkan William D. Coplin, *Introduction To International Politic, A Theoretical Overview*, terjemahan M. Marbun, CV. Sinar Baru Offset, Bandung, 1992, hal 30.

Para pengambil keputusan akan mempertimbangkan untung rugi dalam menentukan kebijakan. Disamping itu, para pembuat keputusan sebagai aktor yang rasional, juga mempertimbangkan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan itu, bahwa pengambilan keputusan, disadari atau tidak, memiliki pendapat prioritas nilai dan konsepsi tentang sarana-sarana yang dipunyai dari tujuan tersebut.¹⁰

Setiap kebijakan yang dipilih oleh pengambil keputusan merupakan wujud dari kepentingan nasional (*national interrests*). Konsep kepentingan nasional dapat

⁹ William D. Coplin, *Introduction To International Politic, A Theoretical Overview*, terjemahan Marbun, CV. Sinar Baru Offset, Bandung, 1992, hal 30.

¹⁰ Mektar Mas'ud, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Cetakan 1, IP3C

digunakan untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara tidak selalu sama, tetapi kepentingan nasional yang paling mendasar adalah kelangsungan hidup suatu negara (*survival*).

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, Kepentingan Nasional adalah:

“...the fundamental and ultimate determinant that guides the decision of a state in making foreign policy. The national interest of a state is by highly generalized conceptions of those element that constitute the most vital needs. They include self preservation, independence, territorial integrity, military security and economic well being”.¹¹

Yaitu tujuan mendasar yang menjadi tuntutan para pembuat keputusan negara merupakan konsepsi secara umum dari 4 (empat) elemen utama yang dibutuhkan oleh suatu negara. Elemen tersebut adalah pengakuan atas kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan wilayah, dan keamanan ekonomi yang terjaga. Dalam operasional, kepentingan nasional yang tercermin dalam politik luar negeri diterapkan melalui berbagai macam teknik yang berbeda. Bentuknya dapat berupa kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam politik internasional, atau kata lain, suatu negara akan mempergunakan segalanya untuk mempengaruhi luar negeri demi menjamin kepentingan nasionalnya.

Politik luar negeri yang dilakukan sebuah negara kepada negara lain merupakan akibat dari sebuah kepentingan nasional, yaitu kepentingan untuk memajukan dan memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui pengaruh dan dukung

sikap negara lain berdasarkan nilai yang diletakan pada tujuan, unsur waktu dan jenis tuntutan terhadap sistem negara lain. Politik luar negeri mempunyai beberap tujuan, dan dapat dibedakan menjadi:

Pertama, nilai dari kepentingan inti yang melibatkan setiap eksistensi pemerintah dan bangsa yang harus dilindungi dan diperluas sepanjang waktu. Ini merupakan jenis kepentingan yang harus dicapai dengan pengorbanan yang sangat besar dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa sikap kritis. Tujuan jenis ini merupakan tujuan jangka pendek, karena tujuan lain tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya.

Tujuan jangka pendek suatu negara merupakan usaha untuk menjamin kedaulatan dan kemerdekaan wilayah nasional serta menyehatkan sistem politik, sosial dan ekonomi tertentu berdasarkan wilayah tersebut. Jenis lainnya berupa kesatuan jenis, agama atau bahasa.

Kedua, tujuan jangka menengah, yaitu tujuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan serta harapan dalam negeri. Tujuan menengah lainnya adalah meningkatkan prestise negara dalam sistem internasional, terutama dalam bidang ilmiah dan teknologi. Selain itu juga dapat berupa bentuk perluasan diri atau imperialisme.

Ketiga, tujuan jangka panjang atau universal. Merupakan tujuan untuk merencanakan dan sebagai pandangan mengenai organisasi politik dan ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan melaksanakan tuntutan universal karena tujuannya adalah membangun kembali sebuah

sistem internasional menyeluruh menurut rencana atau pandangan yang secara internasional dapat diterapkan.

F. Hipotesa

Untuk memberikan jawaban sementara dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada serta dikaitkan dengan kerangka dasar teori sebagai acuan, dimana akan dibuktikan lebih jauh pada bagian-bagian selanjutnya pada skripsi ini, maka penulis mengambil hipotesa sebagai berikut:

1. Dukungan masyarakat Iran dan para pejabatnya semakin kuat terhadap program nuklirnya, hal ini terlihat pada situasi dalam negeri, banyak unsur dari masyarakat yang menyambut baik sikap keras pemerintah dalam mempertahankan nuklirnya.
2. Kekuatan ekonomi dan militer Iran semakin meningkat karena naiknya harga minyak dunia.
3. Tekanan dan ancaman dari Negara-negara Barat tidak solid dan ragu-ragu.

G. Batasan dan Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi dalam hal waktu dan jangkauan penelitian serta lokasi penelitian itu sendiri guna menambah materi ataupun sumber baik yang sifatnya informatif maupun fakta

Adapun jangkauan penelitian ini dibatasi selama kepemimpinan presiden Ahmaddinejad sampai Tahun 2008.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dan informasi mengenai gambaran umum penelitian, yang penulis peroleh dengan menggunakan teknik data sekunder. Teknik data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan teknik studi pustaka. Oleh karena itu data yang akan diolah adalah data sekunder yang diperoleh dari surat kabar, majalah, makalah-makalah ilmiah, situs internet serta sumber-sumber lain yang relevan dan valid yang mendukung penulisan skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis adalah salah satu syarat mutlak untuk kaidah penulisan yang ilmiah, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara menyajikan hasil penelitian. Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

BAB I : Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penulisan, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Dinamika Kepentingan Iran Dalam Mengembangkan Nuklir : pada bab ini akan dibahas tentang keadaan geografis Iran,

perekonomian Iran, politik dan kekuatan militer Iran juga dinamika kepentingan Iran dalam mengembangkan nuklirnya.

BAB III : Profil Nuklir Iran dan Tanggapan Masyarakat Internasional
Tentang Nuklir Iran: pada bab ini akan dibahas tentang sejarah nuklir Iran, kemampuan militer Iran, sistem pertahanan dan keamanan Iran juga respon masyarakat internasional terhadap nuklir Iran.

BAB IV : Faktor-Faktor Iran Melanjutkan Program Nuklirnya: pada bab ini akan dibahas tentang kronologi awal menuju krisis nuklir Iran dan alasan-alasan Iran untuk tetap melanjutkan program nuklirnya pasca resolusi DK PBB 1747.

BAB V : KESIMPULAN